

Perubahan Rencana Strategis

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURABAYA

TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAF	R ISI	i
DAFTAF	R TABEL	iii
DAFTAF	R GAMBAR	V
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2Landasan Hukum	16
	1.3Maksud dan Tujuan	21
	1.3.1 Maksud	21
	1.3.2 Tujuan	21
	1.4Sistematika Penulisan	22
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	24
	2.1.1.a Tugas Perangkat Daerah	24
	2.1.1.b Fungsi Perangkat Daerah	24
	2.1.2 Struktur Perangkat Daerah	25
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	30
	2.2.1 Perlengkapan	32
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
	Perangkat Daerah	73
	2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)	
	dan Renstra Perangkat Daerah	73
	2.4.2 Analisi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
	Lingkungan Hidup Strategis	75
	2.4.3 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan	
	Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan	
	Perangkat Daerah	77
BAB III		
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasrkan Tugas dan	
	Fungsi OPD	79

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan	
Wakil Kepala Daerah Terpilih	81
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota	85
3.3.1 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	87
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	90
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	93
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	96
4.1.1 Perumusan Tujuan	96
4.1.2 Perumusan Sasaran	96
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	10 ⁻
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	106
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	115
BAB VIII PENUTUP	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Agenda Kerja Penyusunan Perubahan Renstra	
	Perangkat Daerah	4
Tabel 1.2	Jadwal dan Agenda Penyusunan Perubahan Renstra	
	Perangkat Daerah	5
Tabel 2.1	Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan	
	Status Kepegawaian	30
Tabel 2.2	Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan	30
Tabel 2.3	Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Tabel 2.4	Inventarisasi Perangkat Daerah	32
Tabel T-C.23	3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
Tabel T-C.24	4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan	
	Perangkat Daerah	69
Tabel 2.7	Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota	
	Terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L	75
Tabel 2.8	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Perangkat Daerah	76
Tabel 2.9	Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota Surabaya	77
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan	
	Sasaran Pembangunan Daerah	80
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD terhadap	
	Pencapaian tujuan dan Sasaran RPJMD	83
Tabel 3.3.1	Telaahan Visi BNPB, BPBD Provinsi JAwa Timur dan	
	Pemerintah Kota Surabaya	86
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarakan	
	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor	
	Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	90
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan	

	Telaahan KLHS beserta Faktor Tantangan dan Peluangnya	92
Tabel 3.6	Telaahan Perumusan Isu Strategis	95
Tabel 4.1	Tabel Narasi Antara Penjenjangan Kinerja, Tujuan, Sasaran,	
	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	97
Tabel 4.2	Tabel Penjenjangan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	
	dan Kegiatan Perangkat Daerah	98
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	100
Tabel 5.1	Kertas Kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan	102
Tabel T-C.26	S Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	103
Tabel 5.3	Linieritas Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra PD	104
Tabel 5.4	Linieritas Arah Program Politis Terhadap Program,	
	Kegiatan dan Sub Kegiatan	104
Tabel 6.1	Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan	107
Tabel T.C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Perubahan	
Renstra Perangkat Daerah	7
Gambar 1.4 Alur Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah	15
Gambar 1.5 Keterkaitan Antara Perubahan Renstra Perangkat	
Daerah dengan RPJMD	16
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah	28

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana yang terjadi di kota Surabaya. Rumusan permasalahan tersebut diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021–2026.

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dokumen Perubahan Renstra PD ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Urusan yang diampu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, yaitu Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum Bidang Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat, yang diformulasikan dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu kedepan (s/d Tahun 2026).

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2021–2026 adalah jawaban konkrit terhadap upaya dalam penanggulangan bencana Kota Surabaya yang dituangkan pada kegiatan program yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mancapai visi dan misi Pemerintah Kota Surabaya.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2021–2026 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

- 1) Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah
 - Tahapan persiapan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
 - a. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Perangkat Daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.

Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing Perangkat Daerah dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Tugas tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah dijabarkan kedalam agenda kerja yang

dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Susunan keanggotaan tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Ketua Tim : Kepala Perangkat Daerah

Sekretaris Tim : Kasubag TU/pejabat lainnya

Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.

b. Orientasi mengenai Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Orientasi mengenai Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundangundangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen

Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Bahan orientasi mengenai Perubahan Renstra Perangkat Daerah, mencakup:

a) Peraturan perundang-undangan, antara lain : tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian

urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- b) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan anggaran.
- c) Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Rencana kegiatan tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran KDH hingga verifikasi rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan musrenbang.

Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan penyusunan RPJMD. Contoh agenda kerja penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Contoh Agenda Kerja Penyusunan Perubahan
Renstra Perangkat Daerah

No	Kegiatan		Bulan I		I	Bulan II				Bulan III				Bulan IV			[V
110	Regiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penyusunan																
	Perubahan Renstra PD																
2.	Penyusunan Rancangan																
	Perubahan Renstra PD																
3.	Penyusunan Rancangan																
	Perubahan Renstra PD																
a.	Penyampaian rancangan						ĺ										
	Perubahan Renstra PD																
b.	Verifikasi rancangan				Ì												
	Perubahan Renstra PD																
4.	Musrenbang RPJMD				ĺ		İ		İ	İ	İ		İ				

Tabel 1.2 Jadwal dan Agenda Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

		Waktu											
No.	Uraian		Ма	ret			April			Mei		Tanggal	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
1	Penyampaian surat edaran Sekda tentang penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026												17 Maret 2022
2	Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra Tahun 2021-2026												17 Maret - 24 Maret 2022
3	Penyampaian surat edaran Kepala Daerah tentang penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan Renstra Tahun 2021-2026												25 Maret 2022
4	Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Rancangan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026												28 Maret - 8 April 2022
5	Penyempurnaan Rancangan Renstra berdasarkan Hasil Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah												11 April - 14 April 2022
6	Penyampaian Rancangan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi												18 April 2022
7	Verifikasi Rancangan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026												19 April - 26 April 2022
8	Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Tahun 2021-2026												27 April - 6 Mei 2022
9	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi												9 May 2022
10	Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Tahun 2021-2026												10 Mei - 13 Mei 2022
11	Penyampaian rancangan akhir Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada												17 May 2022
12	Penetapan Perkada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026												19 May 2021

d. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkahlangkah, sebagai berikut :

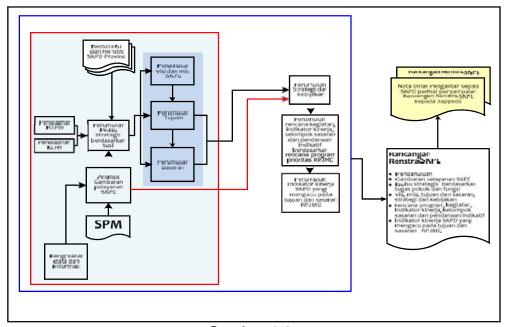
- Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis;
- b) Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah, antara lain:

- a) Peraturan perundang-undangan yang terkait;
- b) Kebijakan pemerintah yang terkait;
- c) Dokumen-dokumen:
 - (a) RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD provinsi;
 - (b) RPJMD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota;
 - (c) Hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah periode lalu;
 - Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.
 Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah antara lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

- 2) Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahap penyusunan rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari dua tahap, yaitu :
 - a) Tahap perumusan rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b) Tahap penyajian rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam gambar 1.3



Gambar 1.3

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Perubahan
Renstra Perangkat Daerah

1) Tahap Perumusan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Perumusan isi dan substansi rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sangat menentukan kualtias dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun, baik untuk

mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working paper). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut :
Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Perubahan Renstra
Perangkat Daerah yang dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD terdiri dari :

(a) Pengolahan data dan informasi

- data dan informasi gambaran pelayanan Perangkat Daerah; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan Perangkat Daerah, (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, (3)data dan informasi yang aspirasiaspirasi menunjukkan masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan Perangkat Daerah.
- data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah: mencakup (1) data pendapatan Perangkat Daerah, (2) data belanja Perangkat Daerah, (3) data pembiayaan Perangkat Daerah (khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD).

- (b) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, terdiri dari:
 - analisis gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
 - analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.
- (c) Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah Untuk penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah provinsi, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, yang mencakup:
 - tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
 - program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
 - tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
 - program prioritas Perangkat Daerah kabupaten/kota dan targetkinerja serta lokasi program prioritas.

Untuk penyusunan rancangan Renstra Perubahan Perangkat Daerah kabupaten/ kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, yang mencakup:

- tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
- program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
- tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi; dan
- program prioritas Perangkat Daerah provinsi dan target kinerjaserta lokasi program prioritas.

- (d) Penelaahan Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup :
 - tujuan dan sasaran RTRW;
 - struktur dan pola ruang; dan

١

- indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
- (e) Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsiPerangkat Daerah.
- (f) Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:
 - Hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah (potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah);
 - Hasil review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah provinsi dan hasil review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi untuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
 - Hasil penelaahan RTRW;
 - Hasil analisis dokumen KLHS; dan
 - Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d).
- (g) Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah;
- (h) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah; dan
- (i) Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah :

- (a) Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Perubahan Renstra Perubahan Perangkat Daerah beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per- Perangkat Daerah;
- (b) Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMDyang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (c) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
- (d) Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
- (e) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah.
- 2) Tahap Penyajian Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra Perangkat Daerah, fungsi Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Perubahan Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, Perangkat Daerah, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perubahan Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masihoperasional.

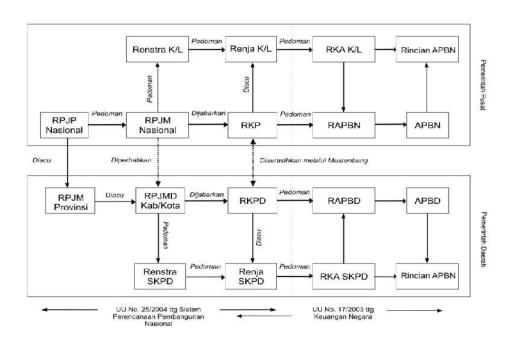
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

3) Keterkaitan Antara Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional, maka seharusnya Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021–2026.

Adapun gambaran tentang hubungan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.4.

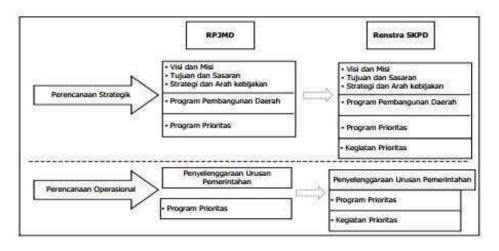


Gambar 1.4. Alur Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mengacu pada Dokumen RPJM Provinsi Jawa Timur tahun

2019–2024. Sehingga RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021–2026 dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021–2026 serta dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perubahan-PD) tahun 2021–2026 dilaksanakan dengan melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perubahan yang digunakan sebagai bahan masukan untuk **RPJMD** Kota Surabaya penyempurnaan Tahun Dokumen Perubahan Renstra ini juga harus memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya antara lain RPJMN, RT RW, Renstra Provinsi, Renstra Kementerian/Lembaga, dsb. Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah, nantinya akan digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang nantinya akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama satu tahun dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai acuan kegiatan dan anggaran pelaksanaan.



Gambar 1.5 Keterkaitan Antara Perubahan Renstra
Perangkat Daerah dengan RPJMD

1.2 Landasan Hukum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, bahwa kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yaitu di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus menyiapkan kebutuhan peralatan darurat untuk tanggap kebencanaan, memperhatikan aspek SDM dengan menempatkan Anggota Satlinmas untuk memenuhi pos-pos pantau yang ada, serta meningkatkan kegiatan sosialisasi tanggap bencana di masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Surabaya mempunyai *fungsi* sebagai berikut :

- 1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penanggulangan Bencana.
- 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus yaitu di Bidang Penanggulangan Bencana.
- 4. Pengelolaan ketatausahaan.
- 5. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran adalah :

- 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 2024
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D):
- 21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 -2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 52 Seri E);
- 22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17);
- 23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
- 24.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
- 25.Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;

26. Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.

Peraturan tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 (Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008)
 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa / Kelurahan Tangguh Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
- 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya 2021 – 2026 merupakan bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2021 – 2026.

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Urusan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten / Kota dan merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 Tahun ke depan serta menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan urusan penanggulangan bencana.

Di samping itu, Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya menjadi salah satu acuan rencana pembangunan tahunan yang disusun dengan maksud untuk mengarahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya dalam menentukan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya. Dengan adanya Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026 dapat merencanakan kebutuhan penanggulangan bencana kabupaten / kota dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kota Surabaya

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya disusundengan sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB III PERMASALAHAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis
- 3.5. Penentuan Isu isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURABAYA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1.a Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021, tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, bahwa kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.1.1.b Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai *fungsi* sebagai berikut :

- 1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penanggulangan Bencana Daerah
- Peberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus yaitu di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah
- 4. Pengelolaan ketatausahaan.
- Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 STRUKTUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dalam Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya dengan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021, tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya sebagai berikut:

1. KEPALA BADAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, sedangkan fungsinya:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan;
- c. pelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesekretariatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- 1). Sub Koordinator Umum dan kepegawaian
- 2). Sub Bagian Keuangan

3. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, sedangkan fungsinya :

 a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- pelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
 Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- 1). Sub Koordinator Pencegahan
- 2). Sub Koordinator Kesiapsiagaan

3. BIDANG KEDARURATAN, LOGISTIK, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi sedangkan fungsinya:

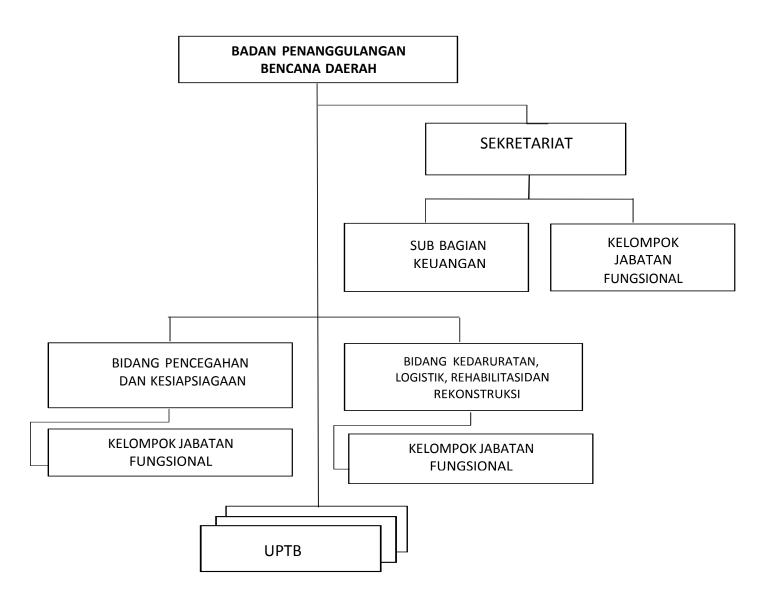
- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- pelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
 Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- 1). Sub Koordinator Operasional Kedaruratan
- 2). Sub Koordinator Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Selanjutnya gambaran Penanggulangan Bencana
Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021
adalah sebagaimana ditunjukkan dibawah ini yaitu tentang
bagan Organisasi Badan.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana DaerahKota Surabaya

2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Secara keseluruhan jumlah personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan bulan Mei 2022 adalah sebanyak 444 Orang, dengan rincian 24 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 420 orang Tenaga Kontrak. Tabel 2.1 menunjukkan tingkat pendidikan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang beragam mulai dari SLTP, SLTA, Diploma, Strata I, hingga Strata II dengan mayoritas adalah Sarjana dan lulusan SLTA. Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan sebagian besar personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Golongan II dan Golongan III (Tabel 2.2).

Tabel 2.1

Jumlah SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Tingkat
Pendidikan dan Status Kepegawaian

	Status Kepegawaian								
Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Tenaga Kontrak	Tenaga Harian Lepas	Total					
Pasca Sarjana	5 orang	1 orang	-						
Sarjana	10 orang	66 orang	-						
Diploma	- orang	11 orang	-						
SMA / SMK	9 orang	335 orang	-						
SMP	- orang	4 orang	-						
SD	- orang	3 orang	-						
Total	24 orang	420 orang	-	444 orang					

Tabel 2.2

Jumlah SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	Golongan IV	3 orang
2	Penata	Golongan III	11 orang
3	Pengatur	Golongan II	10 orang
4	Juru	Golongan I	- orang

a. Menurut golongan

Golongan I : - orang
 Golongan II : 10 orang
 Golongan III : 11 orang
 Golongan IV : 3 orang
 Tenaga Kontrak : 420 orang

Tabel 2.3

Jumlah SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	5		5
2	Sarjana	7	3	10
3	Diploma	0		0
4	SLTA	7	2	9
5	SLTP	0		0
6	SD	0		0

b. Menurut pendidikan (Tanpa Tenaga Kontrak)

1) Pasca Sarjana : 5 orang
2) Sarjana : 10 orang
3) Diploma : - orang
4) SLTA : 9 orang

c. Menurut Eselon

1) Eselon II : - orang2) Eselon III : 3 orang3) Eselon IV : 1 orang

d. Diklat Penjenjangan dengan rincian:

Diklatpim IV : 4 orang
 Diklatpim III : 3 orang
 Diklatpim II : - orang

2.2.1 Perlengkapan

Berdasarkan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) perlengkapan yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi terdiri dari berbagai macam perlengkapan dari mulai mesin perahu, mobil, sepeda motor, dll. Secara lengkap perlengkapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasar KIB adalah sebagaimana dibawah ini.

Tabel 2.4
Inventarisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Surabaya

No.	Nama	Jumlah	Kor	ndisi
NO.	Nama	Juman	Baik	Rusak
1	Air Conditioner	20	18	2
2	Alat Pembersih Bertekanan Tinggi	15	8	7
3	Alat Pengaman/Sinyal	3	3	-
4	Alat Penghancur Kertas	2	2	-
5	Alat Penjernih Air	50	15	35
6	Alat Semprot Disinfektan Manual	11	3	8
7	All In One Pc (Personal Computer)	29	25	4
8	Almari Arsip Katalog	5	5	-
9	Almari Kayu	2	2	-
10	Apar (Fire Extinguisher)	24	24	-
11	Bangunan Pos Jaga Di Kawasan JlKeputran	1	1	-
12	Bangunan Pos Jaga Lokasi Pos Jaga Di Kawasan Jl. Mayjend Sungkono Surabaya	1	1	-
13	Bangunan Pos Jaga Dan Toilet Alon - Alon Contong	1	1	-
14	Bangunan Lokasi Pos Jaga Dan Toilet Bambu Runcing	1	1	-
15	Bangunan Pos Jaga Dan Toilet Ujung Galuh Surabaya	1	1	-
16	Bangunan Pos Jaga Dan Toilet Taman Kalongan Indrapura Kota Surabaya	1	1	-

No.	Nama	Jumlah	Kor	ndisi
NO.	Nama	Juillian	Baik	Rusak
17	Bangunan Pos Jaga Portable Kawasan Perekonomian Surabaya Selatan (Kbs)	1	1	-
18	Bangunan Pos Jaga Jl. Indrapura	1	1	=
19	Bangunan Pos Jaga Bundaran PTC	1	1	-
20	Bangunan Pos Jaga Genteng Besar	1	1	-
21	Bangunan Pos Jaga Panjang Jiwo	1	1	=
22	Bangunan Pos Jaga Kawasan Perekonomian Pasar Dupak Surabaya	1	1	-
23	Bangunan Pos Jaga Mulyorejo Surabaya	1	1	-
24	Bangunan Pos Jaga Taman Korea Surabaya	1	1	-
25	Bangunan Pos Jaga Basuki Rahmat	1	1	-
26	Bangunan Pos Jaga Tunggorono	1	1	-
27	Bangunan Pos Jaga Gununganyar Merr	1	1	-
28	Bangunan Smoking Area	1	1	-
29	Camera Digital	3	3	-
30	Chainsaw	60	56	4
31	Coffee Table	2	2	-
32	Compressor Air	2	2	-
33	Compressor Breathing Air	2	2	-
34	Cup Sealer	10	8	2
35	Decoder	9	9	-
36	Desktop Pc (Personal Computer)	23	17	6
37	Desktop Pc (Personal Computer) (Non Layar)	44	40	4
38	Digital Depth Sounder	1	1	-
39	Dispenser	16	0	16
40	Dispenser Hot And Cool	26	20	6
41	Drone	3	1	2
42	Filling Cabinet	35	33	2
43	Finger Print Doorlock	1	1	-
44	Gapura Dinas	1	1	-
45	Gedung Kantor	1	1	-
46	Gudang Peralatan Kebencanaan Lokasi Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Di Tambaksari Surabaya	1	1	-
47	Generator Portable	12	12	-
48	Gps (Global Positioning System)	10	10	-
49	Hand Tool Kit	10	10	-

NI a	Name	lumala!	Kor	ndisi
No.	Nama	Jumlah	Baik	Rusak
50	Hand Trolly	8	8	=
51	Handheld Metal Detector	111	95	16
52	Handy Talky	150	146	4
53	Handycam	1	1	-
54	Hdmi Transmitter Receiver	51	51	-
55	Horn Speaker	3	3	-
56	Inspection Mirror	10	10	=
57	Kamera Digital	5	5	=
58	Kendaraan Bermotor Roda Empat	20	19	1
59	Kendaraan Bermotor Roda Enam	3	3	-
60	Kendaran Bermotor Roda Dua	30	26	4
61	Kipas Angin	51	43	8
62	Kompor Gas	21	21	-
63	Koper	7	7	-
64	Kursi Kerja Esselon	7	7	-
65	Kursi Operator	29	29	-
66	Kursi Putar	70	70	-
67	Kursi Tunggu 4 Seat	6	6	-
68	Lampu Rotary	37	28	9
69	Lampu Sorot Led	41	41	-
70	Laptop	5	3	2
71	Laser Distance Meter	2	2	-
72	Lemari Arsip	2	2	-
73	Lemari Besi	12	12	-
74	Lemari Es 1 Pintu	2	2	-
75	Lemari File Built In	1	1	-
76	Lemari Kaca	5	5	-
77	Lemari Kayu	1	1	-
78	Lemari Pakaian 2 Pintu	1	1	-
79	Lemari Pintu Geser	6	6	-
80	Lighting Portable	3	3	-
81	Loker Katun	3	3	-
82	Megaphone	31	26	5
83	Meja Kerja	20	20	-
84	Meja Operator	1	1	-
85	Meja Rapat	3	3	-
86	Meja Resepsionis	2	2	-
87	Meja Staf	3	3	-
88	Meja Sudut	2	2	-

Na	Nama	lumlah	Kor	ndisi
No.	Nama	Jumlah	Baik	Rusak
89	Meja Touchscreen	1	1	-
90	Meja Tulis	2	2	-
91	Meja Tulis - Meja Staf	35	35	-
92	Meja Tulis (Workstation)	2	2	-
93	Meja Tulis Staf	10	10	-
94	Mesin Fotocopy	1	1	-
95	Mesin Hitung Uang Portable	1	1	-
96	Mesin Las Portable	1	1	=
97	Mesin Perahu	17	13	4
98	Mic Wireless	4	4	-
99	Mirror Inspection	3	3	_
100	Mobile Rig	16	16	-
101	Monitor LED	20	20	-
102	Panaboard	1	1	-
103	Papan Tulis Eleltronik	1	1	-
104	Perahu Karet Lcr (Landing Craft Rubber)	10	6	4
105	Perahu Karet Oval (Rafting)	4	2	2
106	Pesawat Telepon	6	6	-
107	Pompa Air	7	7	-
108	Pompa Air Booster	11	11	-
109	Portable Amplifier Wireless	1	1	-
110	Pos Pantau Taman Bungkul	1	1	-
111	Pos Jaga Kawasan Perekonomian Jl.Tembaan	1	1	-
112	Pos Jaga Jl. Kenjeran Surabaya	1	1	-
113	Power Supply	9	9	-
114	Pressure Sprayer	2	2	-
115	Printer All In One	8	8	-
116	Printer Dotmatrix	1	1	-
117	Printer Laserjet	8	8	-
118	Rack Server	1	1	-
119	Radio Tape Recorder	2	2	-
120	Ragum	2	2	-
121	Rak Besi	8	8	-
122	Rig	4	4	-
123	Sarana Prasarana Taman	1	1	-
124	Scanner	3	3	-
125	Senter Tembus Asap	10	10	-
126	Sepeda	18	16	2

No.	Nama	Jumlah	Kor	ndisi
NO.	Nama	Juman	Baik	Rusak
127	Sofa	4	4	-
128	Steam Cuci Mobil	1	1	-
129	Takel 2 Ton	2	2	-
130	Tandon Air	41	41	-
131	Tandu Alumunium	30	30	-
132	Tangga Sliding	11	11	-
133	Tangki Air Kapasitas 2300 Ltr	20	20	-
134	Televisi	12	12	-
135	Tempat Parkir	1	1	-
136	Tempat Sampah Stainless Steel	4	4	-
137	Tenda Kegiatan	33	0	33
138	Tenda Kuncup Uk.3x3	18	0	18
139	Tenda Pleton	2	2	-
140	Tenda Posko	5	0	5
141	Termos Pemanas Listrik	3	3	-
142	Thermo Gun	53	47	6
143	Toilet Portable	2	2	-
144	Tripod Rescue	4	4	-
145	Uninterruptible Power Source (Ups)	20	16	4
146	Vacum Cleaner	1	1	-
147	Water Heater	1	1	-
148	White Board	7	7	-
149	Workstation	2	2	-

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kinerja pelayanan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya berdasarkan sasaran / target renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan /atau indikator kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan /atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun penyajian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya

	Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get	Tar get	Targe t Indik		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi	İ				Capaiar	1	
		Fungsi Perangkat Daerah	NSP K	IKK	ator Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuha n kebutuhan sarana dan prasarana perkantor an	N/A	N/A	N/A	62%	64%	66%	N/A	N/A	70.9 6%	84.27 %	87.7 7%	N/A	N/A	114. 45%	131. 67%	132. 98%	N/A	N/A
		Tingkat capaian keberhasil an pelaksana an program	N/A	N/A	N/A	90.8 4%	91.53 %	91.9 6%	N/A	N/A	100. 00%	100%	100. 00%	N/A	N/A	110. 08%	109. 25%	108. 74%	N/A	N/A

	Le	evel	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi	i				Capaiar	1	
			Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
			Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	N/A	N/A	N/A	76%	77%	78%	N/A	N/A	76.5 8%	84.43 %	88.2 9%	N/A	N/A	100. 76%	109. 65%	113. 19%	N/A	N/A
Sasaran : Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah		Kinerja Pengelola an Sarana, Prasarana, dan Administr asi Perkantor an Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	100 %	100%	100	N/A	N/A	89.9 4%	99.27 %	98.8 1%	N/A	N/A	89.9 4%	99.2 7%	98.8 1%	N/A	N/A	
		Program Perencana an Pembangu nan Daerah	Persentas e ketepatan waktu penyusun an dan pelaporan Dokumen Perencana an strategis	N/A	N/A	N/A	100 %	100%	100	N/A	N/A	100. 00%	100%	100. 00%	N/A	N/A	100. 00%	100 %	100 %	N/A	N/A

	Leve	ıl	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	erja			ı	Realisasi					Capaiar	1	
			Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
			dan/atau sektoral																		
		Kegiata n: Penyusu nan dan Evaluasi Perenca naan Strategi s	Jumlah dokumen penyusun an dan evaluasi perencana an strategis	N/A	N/A	N/A	9 doku men	N/A	N/A	N/A	N/A	8 doku men	N/A	N/A	N/A	N/A	88.8 9%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Kegiata n: Penyusu nan Dokume n Perenca naan, Pengan ggaran, dan Evaluasi Perangk at Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an, Pengangg aran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Doku men	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Doku men	N/A	N/A	N/A	N/A	33.3 3%	N/A	N/A	N/A

	Lev	rel	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ſ	Realisasi					Capaiar	1	
			Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Program Pelayanan Administra si Perkantora n	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administra si perkantor an	N/A	N/A	N/A	72%	74%	76%	N/A	N/A	77.0 5%	83.29 %	88.0 1%	N/A	N/A	107. 01%	112. 55%	115. 80%	N/A	N/A
		Kegiata n: Penyedi aan Barang dan Jasa Perkant oran Perangk at Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantor an yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	9 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	9 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100. 00%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Kegiata n: Penyedi aan Barang dan Jasa	Persentas e ketersedia an barang dan jasa perkantor	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	127.7 3%	N/A	N/A	N/A	N/A	127. 73%	N/A	N/A	N/A

	Level		Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi					Capaiar	1	
			Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Perkant oran Perangk at Daerah Kegiata n: Penyedi aan Barang dan Jasa Perkant	Persentas e ketersedia an barang dan jasa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100. 00%	N/A	N/A
		oran Perangk at Daerah aran:	perkantor an Persentas e																		
	keg ses per unt me keb	iatan uai dengan encanaan	kesesuaia n pelaksana an Kegiatan terhadap parameter perencana	N/A	N/A	N/A	100 %	100%	100 %	N/A	N/A	100. 00%	100%	100. 00%	N/A	N/A	100. 00%	100 %	100. 00%	N/A	N/A

	Lev	el	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ſ	Realisasi					Capaiar	1	
			Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
			an pada Operation al Plan																		
		Program Pembangu nan dan Pengelolaa n Sarana dan Prasarana kedinasan	Persentas e sarana dan prasarana perkantor an dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	100 %	100%	100 %	N/A	N/A	79.8 8%	98.54 %	97.6 1%	N/A	N/A	79.8 8%	98.5 4%	97.6 1%	N/A	N/A
		Kegiata n: Pengad aan dan Pemelih araan Sarana dan Prasara na Perkant oran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantor an yang dikelola	N/A	N/A	N/A	94 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	97 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	103. 19%	N/A	N/A	N/A	N/A

Level				Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi					Capaiar	1	
				Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
			Kegiata n: Pemelih araan dan Pengad aan Sarana Perkant oran	Jumlah unit sarana perkantor an yang dipelihara dan diadakan	N/A	N/A	N/A	N/A	189 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	80 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	42.3 3%	N/A	N/A	N/A
			Kegiata n: Pemelih araan dan Pengad aan Sarana Perkant oran	Persentas e pemelihar aan dan pengadaa n sarana perkantor an	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100. 00%	N/A	N/A
sistem mitigasi dan		Indeks penanggul angan bencana	N/A	N/A	N/A	33.7 0%	39.70 %	45.4 0%	N/A	N/A	30.8 4%	37.27 %	55.0 0%	N/A	N/A	91.5 1%	93.8 9%	121. 15%	N/A	N/A		

		Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ſ	Realisasi					Capaiar	1	
	antisipatif dan		Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		intisipatif dan anggap																			
		Sasaran : Meningkatkan kompetensi penanggulang an bencana	Indeks penanggul angan bencana alam	N/A	N/A	N/A	78.7 0%	84.70 %	90.4 0%	N/A	N/A	76.0 0%	82.27 %	100. 00%	N/A	N/A	96.5 7%	97.1 3%	110. 62%	N/A	N/A
		Program Penanggul angan Bencana	Persentas e kelurahan tangguh bencana	N/A	N/A	N/A	29%	49%	68%	N/A	N/A	30.5 2%	40.91 %	100. 00%	N/A	N/A	105. 24%	83.4 9%	147. 06%	N/A	N/A
			Persentas e waktu tanggap ≤ 24 jam penanggul angan kejadian bencana alam	N/A	N/A	N/A	100 %	100%	100 %	N/A	N/A	100. 00%	100%	100. 00%	N/A	N/A	100. 00%	100 %	100 %	N/A	N/A

	Leve	I	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi					Capaiar	1	
			Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Kegiata n: Pelatiha n dan pengen dalian keaman an, ketente raman, dan perlindu ngan masyara kat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkat an bela negara	N/A	N/A	N/A	450 oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	349 oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	77.5 6%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Kegiata n: Pelatiha n Pencega han dan Pengura ngan Resiko Bencan a	Jumlah peserta Pelatihan Pencegaha n dan Pengurang an Resiko Bencana	N/A	N/A	N/A	2120 oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	2089 oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	98.5 4%	N/A	N/A	N/A	N/A

	Le	evel		Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik		Tar	get Kine	rja			ſ	Realisasi					Capaiar	1	
				Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	ator Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
			Kegiata n: Pemberi an Kebutuh an Dasar bagi Korban Bencan a	Jumlah laporan penyediaa n permakan an, bahan pokok, dan sarana prasarana bagi korban bencana	N/A	N/A	N/A	36 lapor an	N/A	N/A	N/A	N/A	35 lapor an	N/A	N/A	N/A	N/A	97.2 2%	N/A	N/A	N/A	N/A
			Kegiata n: Pengad aan Sarana dan Prasara na Penang gulanga n Bencan a	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Penanggul angan Bencana yang diadakan	N/A	N/A	N/A	57 Jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	53 Jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	92.9 8%	N/A	N/A	N/A	N/A

	Le	evel		Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik		Tar	get Kine	rja			ſ	Realisasi	İ				Capaiar	1	
				Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	ator Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
			Kegiata n: Pengem bangan Sistem Penang gulanga n Bencan a Daerah	Jumlah peserta pengemba ngan Sistem Penanggul angan Bencana Daerah	N/A	N/A	N/A	1340 Oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	314 Oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	23.4	N/A	N/A	N/A	N/A
			Kegiata n: Penguat an Kapasita s dalam kesiapsi agaan mengha dapi bencana	Jumlah peserta penguatan kapasitas dalam kesiapsiag aan menghada pi bencana	N/A	N/A	N/A	1130 oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	937 oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	82.9 2%	N/A	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi					Capaiar	1	
	Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kegiata n: Peningk atan Manaje men Logistik, rehabilit asi dan rekontr uksi dalam penang gulanga n bencana	Jumlah laporan pelaksana an Peningkat an Manajeme n Logistik, rehabilitas i dan rekontruks i dalam penanggul angan bencana	N/A	N/A	N/A	12 lapor an	N/A	N/A	N/A	N/A	12 lapor an	N/A	N/A	N/A	N/A	100. 00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiata n: Pengad aan Sarana Penang gulanga n Bencan a	Jumlah item sarana penanggul angan bencana yang diadakan	N/A	N/A	N/A	N/A	137 item	N/A	N/A	N/A	N/A	92 item	N/A	N/A	N/A	N/A	67.1 5%	N/A	N/A	N/A

	Le	evel		Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi					Capaiar	1	
				Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
			Kegiata n: Pelatiha n kesiapsi agaan mengha dapi bencana	Jumlah peserta Pelatihan kesiapsiag aan menghada pi bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	515 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	671 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	130. 29%	N/A	N/A	N/A
			Kegiata n: Peningk atan Manaje men Logistik, rehabilit asi dan rekontr uksi dalam penang gulanga n bencana	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkat an Manajeme n Logistik, rehabilitas i dan rekontruks i dalam penanggul angan bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	1470 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	1363 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	92.7 2%	N/A	N/A	N/A

	Le	vel		Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ſ	Realisasi	İ				Capaiar	1	
				Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		1 1 1 1 1 1 1	Kegiata n: Pelatiha n Pencega han dan Pengura ngan Resiko Bencan	Jumlah peserta Pelatihan Pencegaha n dan Pengurang an Resiko Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	2300 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	2335 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	101. 52%	N/A	N/A	N/A
		1	Kegiata n: Pemberi an Kebutuh an Pokok bagi Korban Bencan	Jumlah korban bencana yang mendapat kan kebutuhan pokok	N/A	N/A	N/A	N/A	6026 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	410 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	6.80 %	N/A	N/A	N/A

	Lev	el	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ſ	Realisasi					Capaiar	1	
			Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Kegiata n: Pengem bangan Manaje men Penang gulanga n Bencan a Daerah	Jumlah peserta pengemba ngan Manajeme n Penanggul angan Bencana Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	1340 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	942 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	70.3 0%	N/A	N/A	N/A
		Kegiata n: Pelatiha n Pencega han dan Pengura ngan Risiko Bencan a	Jumlah peserta Pelatihan Pencegaha n dan Pengurang an Resiko Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2100 oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	2313 oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	110. 14%	N/A	N/A

	Lev	el	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi					Capaiar	1	
			Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Kegiata n: Penyedi aan Kebutuh an Pokok Korban Bencan a	Terpenuhi nya Kebutuha n Pokok Korban Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100. 00%	N/A	N/A
		Kegiata n: Pengad aan Sarana Penang gulanga n Bencan	Jumlah jenis sarana penanggul angan bencana yang diadakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	23 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	92.0 0%	N/A	N/A

	Level		Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi					Capaiar	1	
			Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Kegiata n: Pengem bangan Manaje men Penang gulanga n Bencan a Daerah	Jumlah Kegiatan Pengemba ngan Manajeme n Penanggul angan Bencana Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Kegi atan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Kegi atan	N/A	N/A	N/A	N/A	100. 00%	N/A	N/A
		Kegiata n: Peningk atan Kapabili tas Kesiapsi agaan Mengha dapi Bencan a	Jumlah peserta peningkat an kapabilitas kesiapsiag aan menghada pi bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	635 oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	705 oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	111. 02%	N/A	N/A

	Leve	I	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi					Capaiar	1	
			Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Kegiata n: Pengem bangan Manaje men Logistik, Rehabili tasi dan Rekontr uksi dalam Penang gulanga n Bencan a	jumlah kegiatan Pengemba ngan Manajeme n Logistik, Rehabilita si dan Rekontruk si dalam Penanggul angan Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Kegi atan	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Kegi atan	N/A	N/A	N/A	N/A	100. 00%	N/A	N/A
pelaksanaan norma masyarakat,		Angka kejadian anarkis per 100.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	1.02	0.99	0.95	N/A	N/A	N/A	0.37	0.44	N/A	N/A	N/A	162. 25%	153. 51%	N/A	N/A	

	Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi					Capaiar	1	
dalam kerangka perlindungan masyarakat		Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	_																			
	Sasaran : Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat	Persentas e Petugas perlindung an masyaraka t (linmas) di kabupaten /kota	N/A	N/A	N/A	81,6 0%	82,60 %	83,5 0%	N/A	N/A	81.6 0%	71.38 %	81.3 3%	N/A	N/A	100. 00%	86.4 1%	97.4 0%	N/A	N/A
	Program Peningkata n Ketentera man, Ketertiban dan Kenyaman an Lingkungan	Persentas e tertangani nya gangguan ketentram an dan ketertiban umum	N/A	N/A	N/A	100 %	100%	100 %	N/A	N/A	100. 00%	100%	100. 00%	N/A	N/A	100. 00%	100 %	100 %	N/A	N/A

	Leve	ı	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ſ	Realisasi					Capaiar	1	
			Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Kegiata n: Pengen dalian keaman an, ketente raman, dan perlindu ngan masyara kat	Jumlah laporan Pengendal ian keamanan , ketentera man, dan perlindung an masyaraka t	N/A	N/A	N/A	46 lapor an	N/A	N/A	N/A	N/A	44 lapor an	N/A	N/A	N/A	N/A	95.6 5%	N/A	N/A	N/A	N/A
		Kegiata n: Pelatiha n kader perlindu ngan masyara kat	Jumlah Peserta Pelatihan kader perlindung an masyaraka t (Kursus kader pelaksana Linmas)	N/A	N/A	N/A	N/A	160 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	200 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	125. 00%	N/A	N/A	N/A

Level				Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			F	Realisasi	İ				Capaiar	า	
				Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
			Kegiata n: Pengen dalian keaman an, ketente raman, dan perlindu ngan masyara kat	Jumlah orang yang mendukun g pengendal ian keamanan , ketentera man, dan perlindung an masyaraka t	N/A	N/A	N/A	N/A	716 Oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	916 Oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	127. 93%	N/A	N/A	N/A
			Kegiata n: Pembin aan Potensi Masyar akat	Jumlah peserta Pembinaa n Potensi Masyaraka t	N/A	N/A	N/A	N/A	160 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	243 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	151. 88%	N/A	N/A	N/A

	Lev	el	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi					Capaiaı	า	
			Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Kegiata n: Pengen dalian Perlindu ngan Masyar akat	Jumlah orang yang mendukun g pengendal ian keamanan , ketentera man, dan perlindung an masyaraka t	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	771 oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	740 oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	95.9 8%	N/A	N/A
		Kegiata n: Pembin aan Potensi Masyar akat	Jumlah kegiatan pembinaa n potensi masyaraka t	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	126 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	155. 56%	N/A	N/A

	L	evel		Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi	İ				Capaiar	1	
				Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kegiata n: Pelatiha n kader perlindu ngan masyara kat		Jumlah peserta pelatihan kader perlindung an masyaraka t	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	100 oran g	N/A	N/A	N/A	N/A	100. 00%	N/A	N/A		
	Me pe	ening	katkan ungan	Rasio Linmas per 1.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	62,6	62,6	N/A	N/A	N/A	65.9 2	N/A	N/A	N/A	N/A	105. 31%	N/A
Sasaran : Meningkatkan kualitas kompetensi perlindungan masyarakat		Persentas e petugas linmas yang telah mendapat kan kompeten si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A		

	Lev	vel		Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi					Capaiar	1	
				Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Pe ng Ka Pe Pe an	pasitas tugas rlindung	Persentas e petugas perlindung an masyaraka t yang ditingkatk an kapasitasn ya sesuai tugas dan fungsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76,8 5%	77,7 2%	N/A	N/A	N/A	75.6 0%	99.4 3%	N/A	N/A	N/A	98.3 7%	127.9 3%
			Kegiata n: Pelatiha n kader perlindu ngan masyara kat	Jumlah peserta pelatihan kader perlindung an masyaraka t	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 oran g	100 oran g	N/A	N/A	N/A	100 oran g	100 oran g	N/A	N/A	N/A	100. 00%	100.0 0%
			Kegiata n: Pembin aan Potensi Masyar	Jumlah kegiatan pembinaa n potensi masyaraka t	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81 kali	81 kali	N/A	N/A	N/A	44 kali	81 kali	N/A	N/A	N/A	100. 00%	100.0 0%

Level				Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi	İ				Capaiar	า		
	akat			Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
				akat																			
Kegiata n: Pengen dalian Perlindu ngan Masyar akat		Jumlah orang yang mendukun g pengendal ian keamanan , ketentera man, dan perlindung an masyaraka t	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	793 oran g	793 oran g	N/A	N/A	N/A	784 oran g	814 oran g	N/A	N/A	N/A	98.8 7%	102.6 5%			
penanggulangan bencana yang		Indeks Penanggul angan Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89,1 9%	92,8 3%	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	112. 12%	N/A			

Le	vel	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi	İ				Capaiai	า	
		Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	ator Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
n d p a	asaran : Newujudkan Ienanganan Ian Ienanggulang In bencana Iang Ierintegrasi	Persentas e penangan an bencana yang terintegra si	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A
	Program Penanggul angan Bencana Alam	Persentas e penanggul angan kejadian bencana alam ≤ 24 jam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100, 00%	100, 00%	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	100%
	Kegiata n: Pengad aan Sarana Penang gulanga n Bencan	Jumlah jenis sarana penanggul angan bencana yang diadakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8 jenis	8 jenis	N/A	N/A	N/A	18 jenis	14 jenis	N/A	N/A	N/A	225. 00%	175.0 0%

Level			ıl	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi					Capaiar	1	
				Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
			Kegiata n: Pengem bangan Manaje men Tanggap Bencan a	Jenis kejadian yang manajeme n tanggap bencanan ya dikemban gkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	11 Jenis	Jenis	N/A	N/A	N/A	110. 00%	0.00%
			Kegiata n: Penyedi aan Kebutuh an Pokok Korban Bencan a	Terpenuhi nya Kebutuha n Pokok Korban Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100. 00%	100.0 0%
			Program Pencegaha n dan Kesiapsiag aan Bencana	Persentas e kelurahan tangguh bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88,0 0%	100, 00%	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	113. 64%	100%

		Lev	vel .	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	erja			ı	Realisasi	i				Capaiar	1	
		Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
			Alam																			
			Kegiata n: Pelatiha n Pencega han dan Pengura ngan Risiko Bencan a	Jumlah peserta Pelatihan Pencegaha n dan Pengurang an Resiko Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1650 oran g	1650 oran g	N/A	N/A	N/A	232 oran g	1608 oran g	N/A	N/A	N/A	100. 00%	97.45 %
			Kegiata n: Peningk atan Kapabili tas Kesiapsi agaan Mengha dapi Bencan a	Jumlah peserta peningkat an kapabilitas kesiapsiag aan menghada pi bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500 oran g	500 oran g	N/A	N/A	N/A	40 oran g	276 oran g	N/A	N/A	N/A	100. 00%	92.00 %

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ſ	Realisasi					Capaiar	1	
	Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Tujuan : Meningkatkan akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>70- 80	>80- 90	N/A	N/A	N/A	76.9 4	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A
Sasaran : Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Kinerja pengelola an sarana dan prasarana serta administra si perkantor an di Perangkat Daerah Pemerinta h Kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A

	Leve	el	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi					Capaiar	1	
			Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Program Pelayanan Administra si Perkantora n	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administra si perkantor an	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	87,0 0 %	88,0 0 %	N/A	N/A	N/A	92.1 8%	92.8 4%	N/A	N/A	N/A	105. 95%	105.5 0%
		Kegiata n: Penyedi aan Barang dan Jasa Perkant oran Perangk at Daerah	Persentas e ketersedia an barang dan jasa perkantor an	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100. 00%	100.0 0%

	Lev	el	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get	Tar get	Targe t Indik		Tar	get Kine	rja			ſ	Realisasi					Capaiar	1	
			Fungsi Perangkat Daerah	NSP K	IKK	ator Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Program Pembangu nan dan Pengelolaa n Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentas e ketepatan pemenuha n sarana dan prasarana perkantor an	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100, 00%	100, 00%	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	100%
			Persentas e sarana dan prasarana perkantor an dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100, 00%	100, 00%	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	100%

Level			Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Tar get NSP	Tar get	Targe t Indik ator		Tar	get Kine	rja			ı	Realisasi	i				Capaiaı	1		
				Fungsi Perangkat Daerah	K	IKK	Lainy a	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
			Kegiata n: Pemelih araan dan Pengad aan Sarana Perkant oran	Persentas e pemelihar aan dan pengadaa n sarana perkantor an	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	100. 00%	100.0 0%

Berdasarkan Tabel T-C. 23 dapat terlihat hasil capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya pada level Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan di rentang tahun 2017 - 2021. Hampir secara keseluruhan realisasi kinerja pada level Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan telah memenuhi dari rencana target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja tersebut didorong oleh beberapa faktor antara lain adanya komunikasi yang baik antar stakeholder terutama dalam penanggulangan bencana yang terjadi.

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya

Uraian			Anggaran				Rea	lisasi Angga	ıran		Rasio	antara R	Realisasi	dan Ang	garan		ı-rata nbuhan
Oraian	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realis asi
Program Pembang unan dan Pengelola an Sarana dan Prasarana kedinasan	1,645,54 5,432	1,052,37 1,436	938,375, 239	N/A	N/A	1,151,11 4,250	722,537, 800	742,554, 350	N/A	N/A	69.95 %	68.66 %	79.13 %	N/A	N/A	21.49	17.75 %
Program Peningkat an Ketentera man, Ketertiba n dan Kenyama nan Lingkung an	16,670,0 26,069	26,555,4 67,651	39,729,2 40,484	N/A	N/A	14,982,5 35,084	24,164,2 78,024	37,692,4 28,309	N/A	N/A	89.88 %	91.00	94.87	N/A	N/A	69.16 %	75.79 %
Program Pelayana n Administ rasi Perkantor an	1,732,44 4,363	1,909,68 3,602	1,886,68 4,663	N/A	N/A	1,481,67 9,047	1,636,49 1,206	1,694,67 0,523	N/A	N/A	85.53 %	85.69 %	89.82 %	N/A	N/A	4.45%	7.19%

Uraian			Anggaran				Rea	llisasi Angga	nran		Rasio	antara R	Realisasi	dan Ang	garan		a-rata nbuhan
Oraian	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realis asi
Program Penanggu langan Bencana	11,927,3 18,109	10,297,8 13,036	9,455,56 4,762	N/A	N/A	9,608,35 2,750	8,616,37 5,784	7,505,29 9,757	N/A	N/A	80.56 %	83.67	79.37 %	N/A	N/A	- 10.36 %	- 10.94 %
Program Perencan aan Pembang unan Daerah	166,366, 504	119,625, 194	0	N/A	N/A	127,796, 000	68,996,0 00	0	N/A	N/A	76.82 %	57.68 %	0.00	N/A	N/A	50.00	50.00
Program Pencegah an dan Kesiapsia gaan Bencana Alam	N/A	N/A	N/A	1,180,54 7,957	N/A	N/A	N/A	N/A	944,504, 759	N/A	N/A	N/A	N/A	80.01	N/A	-	-
Program Pengemb angan Kapasitas Petugas Perlindun gan Masyarak at	N/A	N/A	N/A	42,505,9 81,351	N/A	N/A	N/A	N/A	41,316,5 18,456	N/A	N/A	N/A	N/A	97.20 %	N/A	-	-

Uraian			Anggaran				Rea	lisasi Angga	ıran		Rasio	antara F	Realisasi	dan Ang	ggaran		ı-rata nbuhan
Craian	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realis asi
Program Pelayana n Administ rasi Perkantor an	N/A	N/A	N/A	2,229,30 2,577	N/A	N/A	N/A	N/A	1,992,51 3,247	N/A	N/A	N/A	N/A	89.38 %	N/A	-	-
Program Penanggu langan Bencana Alam	N/A	N/A	N/A	9,442,81 3,219	N/A	N/A	N/A	N/A	8,947,75 9,749	N/A	N/A	N/A	N/A	94.76 %	N/A	1	-
Program Pembang unan dan Pengelola an Sarana dan Prasarana Kedinasa n	N/A	N/A	N/A	1,472,99 8,050	N/A	N/A	N/A	N/A	1,195,06 0,850	N/A	N/A	N/A	N/A	81.13	N/A	1	-
Program Peningkat an Ketentera man Dan Ketertiba n Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	38,850,6 18,018	N/A	N/A	N/A	N/A	37,886,9 00,356	N/A	N/A	N/A	N/A	97.52 %	-	-

Uraian			Anggaran				Rea	lisasi Angga	ıran		Rasio	antara R	Realisasi	dan Ang	garan		n-rata nbuhan
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angg aran	Realis asi
Program Perekono mian Dan Pembang unan	N/A	N/A	N/A	N/A	681,733, 894	N/A	N/A	N/A	N/A	607,029, 822	N/A	N/A	N/A	N/A	89.04 %	1	-
Program Penanggu langan Bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	26,971,2 03,818	N/A	N/A	N/A	N/A	21,521,2 70,499	N/A	N/A	N/A	N/A	79.79 %	-	-
Program Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah Kabupate n/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	10,251,2 45,229	N/A	N/A	N/A	N/A	8,648,92 0,201	N/A	N/A	N/A	N/A	84.37	-	-
Program Penguata n Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsa an	N/A	N/A	N/A	N/A	517,064, 450	N/A	N/A	N/A	N/A	466,365, 550	N/A	N/A	N/A	N/A	90.19	-	-

Berdasarkan Tabel T-C. 24 dapat terlihat sebagian besar nilai rasio antara realisasi dan anggaran berada direntangnilai 75%-95%, dimana ini merupakan nilai rasio yang cukup baik dalam mendukung pencapaian target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya. Pada tahun 2019 terdapat nilai rasio yang memiliki nilai 0% pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikarenakan program tersebut telah dilebur menjadi 1 dalam Program Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.

Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efesien.

Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar maka perlu diberikan simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelengggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga harus terpenuhi secara ideal.

Beberapa hal yang menjadi peluang dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya:

- Adanya komitmen Pemerintah Kota Surabaya terhadap kebijakan Penanggulangan Bencana
- Banyak peluang dalam rangka capacity building antara lain penguatan SDM (Pelatihan aparatur dan masyarakat) terkait denagn peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana
- Telah terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana pada daerahdaerah rawan bencana di Kota Surabaya
- Diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB.

Sedangkan komparasi capaian sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya terhadap sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L di jelaskan dalam tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Indeks Penanggulang an Bencana	Mewujudkan penanganan dan penanggulangan bencana yang terintegrasi	Pengurangan Risiko Bencana Penanganan Bencana yang Responsif	Menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi

2.4.2 Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, dalam RTRW berperan pada strategi pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan lainnya dan strategi penyediaan kawasan ruang evakuasi bencana.

Gambaran hubungan RT/RW dengan fungsi pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Badan Penanggulangan Bencana DaerahKota Surabaya

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	Rencana Pengembangan Sistem Infrastruktur Perkotaan Lainnya	Kondisi jaringan jalan saat ini sudah terintegrasi dan dapat memberikan alternatif rute menuju kawasan bencana Penyediaan posko terpadu yang sudah menjangkau seluruh wilayah	Peningkatkan prasarana dan sarana pada jalur evakuasi untuk mempermudah pencapaian dan proses penanganan korban bencana banjir Pengoptimalan jalur evakuasi melalui sungai dan udara dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang	Penyediaan peralatan pendukung petugas bencana yang memadai Penyediaan kebutuhan kedaruratan dan kelogistikan untuk membantu korban bencana Menyediakan tempat khusus sementara untuk menampung	Kota Surabaya
2	Rencana Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana	1. Kondisi jaringan jalan saat ini sudah terintegrasi dan dapat memberikan alternatif rute menuju kawasan bencana 2. Penyediaan posko terpadu yang sudah menjangkau seluruh wilayah 3. Penyediaan sumur kebakaran yang telah tersebar di seluruh wilayah	memadai Pengoptimalan jalur evakuasi melalui sungai dan udara dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai	torban bencana 1. Penyediaan peralatan pendukung petugas bencana yang memadai 2. Penyediaan kebutuhan kedaruratan dan kelogistikan untuk membantu korban bencana 3. Menyediakan tempat khusus sementara untuk menampung korban bencana	Kota Surabaya

2.4.3 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah

Program kota yang diturunkan menjadi program Perangkat Daerahdalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, memiliki tugas untuk peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi dan aktivitas pemerintahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.9.

Tabel 2.9
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kota
SurabayaBadan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Surabaya

No	Permasalahan / Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
1	Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat	 Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana Peningkatan layanan penanggulan gan bencana (< 7 menit) 	1. Kompetensi petugas penanggulan gan bencana yang belum mumpuni 2. Jumlah pasukan yang masih terbatas	1. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap bencana 2. Terbatasnya titik kumpul bersama (Assembly Point) yang ama dan tersedia	 Penyediaan peralatan yang dapat memitigasi bencana Bantuan secara langsung dari masyarakat

			Faktor yang M	empengaruhi	
	Capaian /	Standar	Internal	Eksternal	Permasalahan
Aspek Kajian	Kondisi Saat ini	yang Digunakan	(Kewenangan OPD)	(Di Luar Kewenangan OPD)	Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat kompetensi dan kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana	Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana		Belum memadainya kompetensi aparat dan kelembagaan penanggulanga n bencana	Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana	Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana secara efektif dan komperhensif

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut secara umum adalah :

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memenuhi tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang menangani permasalahan penanggulangan bencana;
- Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana;
- 3. Masih perlunya upaya peningkatan partisipasi warga dalam mewujudkan Kampung Tangguh Wani Covid-19 (wani sehat, wani jogo, wani sejahtera, dan wani ngandani).
- 4. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Permasalahan ini dikarenakan :
 - 1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
 - 2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif;
 - 3) Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya

seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat.

Tabel 3.1 (T-B 35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Peningkatan pencegahandan Kesiapsiagaan Bencana	Belum optimalnya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	 Masyarakat belum perhatian terhadap bencana yang akanterjadi Kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang hanya menjangkau sebagian masyarakat Penyebaran informasi yang belum menjangkauseluruh masyarakat Keterbatasan Ketersediaan peralatan pendukung pencegahandan kesiapsiagaan terhadap bencana
Peningkatan kapasitas Kelurahan Tangguh Bencana	Belum optimalnya kapasitas kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana	1. Masyarakat belum terkonsentrasi pada peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana karena adanya aktivitaslain 2. Terbatasnya jumlah masyarakat yang belum memperhatikan pentingnya Kelurahan Tangguh Bencana sebagai wadah untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
Keterbatasan kedaruratan,logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi	Masih terbatasnya penanganan kedaruratan, logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi	Keterbatasan akses jaringan Call Center112 Keterbatasan wilayah yang dapat dijangkauoleh petugas Keterbatasan ketersediaan bahan logistik untuk diberikan kepada korban bencana Keterbatasan koordinasi antar stakeholder terkait rehabilitasi dan rekonstruksi

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kota Surabaya untuk periode 2021 – 2026 adalah :
"GOTONG ROYONG MENUJU SURABAYA KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS
DAN BERKELANJUTAN"

Pokok-pokok Visi tersebut dijabarkan pada misi sebagai berikut :

a. Pokok Visi Maju:

Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional

b. Pokok Visi Humanis:

Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya

Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

c. Pokok Visi Berkelanjutan:

Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan

Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya mengampu pada beberapa misi yaitu :

Misi 4:

"Memantapkan Transformasi Birokrasi Yang Bersih, Dinamis Dan Tangkas Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik". Tujuan dari misi tersebut yaitu :

- a. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif, dengan sasaran pembangunan :
 - 1) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
 - 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

Misi 5:

"Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan sosial dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan". Tujuan dari misi tersebut yaitu :

- a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, dengan sasaran pembangunannya:
 - 1) Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang diinginkan oleh Pemimpin Daerah terpilih diwujudkan dalam beberapa program yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya yaitu sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penanggulangan Bencana

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD terhadap Pencapaian Tujuan danSasaran di RPJMD

Tujuan dan	Indikator Tujuan	Indentifikasi	Faktor yang Me	
Sasaran	dan Sasaran	Permasalahan	Pendukung	Penghambat
Tujuan : Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	 Keterbatasan akses jaringanCall Center 112 Keterbatasan wilayah yang dapat dijangkau oleh petugas Masyarakat belum terkonsentrasi pada peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana karena adanya aktivitas lain Keterbatasan Ketersediaan peralatan pendukung pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 	membantu 2. Penyebaran informasi dapat	 Bencana tidak dapat diprediks sebelumnya Pengetahuan mengenai bencana masih kurang Peralatan monitor bencar belum memada

Visi : Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi 5 : Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan sosial dan Kepastian Hukum yangBerkeadilan

Tujuan dan	Indikator Tujuan	Indentifikasi	Faktor yang Me	mengaruhi
Sasaran	dan Sasaran	Permasalahan	Pendukung	Penghambat
Sasaran : Mewujudkan Sinergitas dalam Rangka Mitigasi dan Penanganan Bencana	Penanganan Bencana yang Terintegrasi	Keterbatasan akses jaringanCall Center 112 Keterbatasan wilayah yang dapat dijangkau olehpetugas Masyarakat belum terkonsentrasi pada peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana karena adanya aktivitas lain Keterbatasan Ketersediaan peralatan pendukung pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Masyarakat memahami konteks sebagai makhluk social untuk saling membantu 2. Penyebaran informasi dapat dilakukan secara cepat melalui banyak media	1. Bencana tidak dapat diprediksi sebelumny a 2. Pengetahua nmengenai bencana masih kurang 3. Peralata nmonitor bencana belum memada i

Visi : Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi 5 : Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan sosial dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan

Tujuan dan Sasaran	an Indikator Indentifikasi Tujuandan Bermasalahan		Faktor yang Memengaruhi		
Sasaran	Sasaran	Permasalahan	Pendukung	Penghambat	
Sasaran :	Nilai	Adanya	Adanya	Adanya	
Meningkatkan	SAKIP	prioritas	pedoman	keterbatasan	
Akuntabilitas	Badan	penggunaan	penyusunan	penyedia	
Penyelenggaraan	Penanggula	anggaran,	perencanaan	barangdan	
Pemerintahan	ngan	sehingga	dan	jasa yang	
Daerah pada	Bencana	terjadi	pengadaan	memenuhi	
Badan	Daerah	pembatasan	barang	kualifikasi	
Penanggulanga		terhadap		yang	
nBencana dan		pemenuhan		ditetapkan	
Perlindungan		kebutuhan			
Masyarakat		saranadan			
		prasarana			
		kantor			

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi Jawa Timur.

Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan, tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya diharapkan berkesinambungan dengan kebijakan BNPB di tingkat Pusat dan BPBD Provinsi. Telaahan Renstra BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Telaahan Visi

Berikut telaahan visi BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya :

Tabel 3.3.1

Telaahan Visi BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah

Kota Surabaya

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	BPBD PROVINSI JAWA TIMUR	BPBD KOTA SURABAYA
Visi: BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong- Royong	Visi: Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong	Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	BPBD PROVINSI JAWA TIMUR	BPBD KOTA SURABAYA
Misi : 1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko	Misi : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat	Misi 4: Memantapkan Transformasi Birokrasi Yang Bersih, Dinamis
di daerah rawan bencana 2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi	Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan	Dan Tangkas Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Misi 5:
 Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan Memantapkan tata kelola 	Ruang Budaya	Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan Sosial dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan		

3.3.1 Badan Penanggulangan Bencana (BNPB)

Merujuk pada Rencana Strategis 2020-2024 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sasaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Tahun 2020-2024 adalah

- 1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana
- Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan daruratbencana
- Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitassumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana
- 4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan

penanggulanganbencana yang profesional, akuntabel dan transparan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya tidak lepas dari faktor penghambat maupun faktor pendorong yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L. Terkait dengan hal tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Jangka Menenga h Renstra K/L	Permasalah an Pelayanan OPD Provinsi/Ka bu paten/Kota	Kekuatan / Strengths (S)	Kelemahan / Weakness (W)	Peluang / Opportuniti es(O)	Ancaman /Threats (T)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Mewujudk an sinergitas dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana	Penguranga n resiko bencana yang terintegrasi	1 Tersedianya Landasan hukum Penyelengga raan Penanganan Bencana dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan g an Bencana	1 Kompetensi SDM aparatur	1 Dukungan Pemerintah Pusat/Provin si , OPD Kab/Kota, jajaran samping dan lembaga lainnya untuk penanggula ngan dan mitigasi bencana	1 Kelengkapa nsistem penangana n bencana pada bangunan/g edung
			Kewenangan dalam penanggulang an dan mitigasi bencana	2 Sarana pendukung operasiona I penanggul angan dan mitigasi bencana	2 Partisipasi masyarakat dalam mendukung penanggula ngan dan mitigasi bencana	2 Masih ada daerah rawan bencana

No.	Sasaran Jangka Menenga h Renstra K/L	Permasalah an Pelayanan OPD Provinsi/Ka bu paten/Kota	Kekuatan / Strengths (S)	Kelemahan / Weakness (W)	Peluang / Opportuniti es(O)	Ancaman /Threats (T)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
			E Kecepatan respon pimpinan dan staf terhadap penanggulang an dan mitigasi bencana	Perencana an kebutuhan jumlah tenagadan peningkata n kompetens i SDM	3 Kecepatan respon Kepala Daerah terhadap penanggula ngan dan mitigasi bencana	3 Kondisi alandan sosial yang rawan terjadi bencana
			⁴ SOP Tanggap darurat Bencana	4 Belum memadain ya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyeleng garaan penangan an bencana	4 Dukungan penungkata n kompetensi penanggula ngan dan mitigasi bencana	4 Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatka nintensitas bencana alam
			E Command Center 112	5 Belum adanya Kajian Risiko Bencana (KRB)		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya luas wilayah Kota SurabayaTahun 2014-2034 bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas + 33.451,14 Ha dengan wilayah laut sejauh 1/3 dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura;

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo;

Sebelah Timur : Selat Madura;

Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta FaktorPenghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Peningkatkan prasarana dan sarana pada jalur evakuasi untuk mempermudah pencapaian dan proses penanganan korban bencana banjir	Kota Surabaya	Penyediaan peralatan pendukung petugas bencana yang memadai Penyediaan kebutuhan kedaruratan	Peralatan pendukung petugas bencana belum memadai Kapasitas petugas masih rendah	Peralatan pendukun g petugas bencana belum memadai Kapasitas petugas masih rendah	Masyarakat berusaha untuk saling tolong menolong kepada sesama

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pengoptimalan jalur evakuasi melalui sungaidan udara dilengkapi dengan prasarana dansarana yang memadai	Kota Surabaya	dan kelogistikan untuk membantu korban bencana 3. Menyediakan tempat khusus sementara untuk menampung korban bencana	Peralatan pendukung petugas bencana belum memadai Kapasitas petugas masih rendah	Peralatan pendukun g petugas bencana belum memadai Kapasitas petugas masih rendah	Masyarakat berusaha untuk saling tolong menolong kepada sesama
Pengoptimalan jalur evakuasi melalui sungaidan udara dilengkapi dengan prasarana dansarana yang memadai	Kota Surabaya	Penyediaan peralatan pendukung petugas bencana yang memadai Penyediaan kebutuhan	Peralatan pendukung petugas bencana belum memadai Kapasitas petugas masih rendah	Peralatan pendukun g petugas bencana belum memadai Kapasitas petugas masih rendah	Masyarakat berusaha untuk saling tolong menolong kepada sesama
Integrasi jaringan air minum dengan jaringan hidran kebakaran	Kota Surabaya	kedaruratan dan kelogistikan untuk membantu korban bencana 3. Menyediakan tempat khusus sementara untuk menampung korban bencana	Peralatan pendukung petugas bencana belum memadai Kapasitas petugas masih rendah	Peralatan pendukun g petugas bencana belum memadai Kapasitas petugas masih rendah	Masyarakat berusaha untuk saling tolong menolong kepada sesama

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan
Telaahan KLHS beserta Faktor Tantangan dan Peluangnya

Permasalahan / Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat	1. Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana 2. Peningkatan layanan penanggulang an bencana (< 7 menit)	Kompetensi petugas penanggulanga n bencana yang belum mumpuni Jumlah pasukan yang masih terbatas	1. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap bencana 2. Terbatasnya titik kumpul bersama (Assembly Point) yang ama dan tersedia	1. Penyediaan peralatan yang dapat memitigasi bencana 2. Bantuan secara langsung dari masyarakat

Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran penting dalam hal menjaga Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Surabaya, sehubungan dengan hal tersebut terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

- a. Pemanfaatan data dan informasi untuk analisa keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - Data dan informasi merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan dalam setiap tugas. Dari data dan informasi tersebut dapat dianalisa yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Besarnya kebutuhan pegembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana
 - Dengan jumlah penduduk yang besar maka perlu diberikan simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberikan pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berpespektif pengurangan resiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencanan yang baik.

c. Merubah paradigma penanggulangan bencana

Tantangan yang harus dihadapi adalah merubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan mekanisme program pembangunan sehingga terbangun penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

2. Faktor Pendorong

- a. Kecepatan respon pimpinan dan staf terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan, penanggulangan dan mitigasi bencana. Cepat Tanggap pimpinan ketika muncul persoalan di masyarakat dan dalam penyelesaian persoalan tersebut.
- b. Kewenangan dalam pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan, wawasan kebangsaan.
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Surabaya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis yang akan tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 telah dilakukan beberapa tahapan antara lain :

- Melakukan forum diskusi (Focus Group Discussion/FGD) untuk menentukan permasalahan atau alternatif permasalahan yang dihadapi yang merupakan fator internal (kekuatan dan kelemahan OPD) dan eksternal (peluang dan ancaman/tantangan OPD);
- 2. Menentukan skor dari kriteria atau alternatif permasalahan yang telah ditentukan;

- 3. Melakukan penilaian alternatif permasalahan dan;
- Menghitung rata-rata skor atau bobot setiap permasalahan sehingga akan didapat bobot atau nilai yang paling tinggi itu yang dijadikan sebagai isu strategis.

Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan, maka penentuan isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya sebagai berikut :

- 1. Masih terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
- 3. Masih perlunya upaya peningkatan partisipasi warga dalam mewujudkan Kampung Tangguh Wani Covid-19 (wani sehat, wani jogo, wani sejahtera, dan wani ngandani).

Dengan adanya kondisi umum masa kini maka harapan dan proyeksi kedepan atas kondisi yang ada saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya komponen masyarakat yang mandiri;
- b. Menurunnya ancaman bencana;
- c. Meningkatkan Rakyat Terlatih dan Potensi Perlindungan Masyarakat;
- d. Meningkatkan jumlah potensi masyarakat yang mampu secara mandiri dalam antisipasi dan penanggulangan bencana.

Tabel 3.6 Telaah Perumusan Isu Strategis

No	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Keterbatasan akses jaringan Call Center 112	Belum optimalnya layanan respon cepat darurat bencana
2.	Keterbatasan wilayah yang dapat dijangkau oleh petugas	Belum optimalnya layanan kedaruratan, logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi
3.	Masyarakat belum terkonsentrasi pada peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana karena adanya aktivitas lain	Belum optimalnya fungsi Kelurahan Tangguh Bencana
4.	Keterbatasan Ketersediaan peralatan pendukung pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Terbatasnya ketersediaan peralatan pendukung pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
5.	Masyarakat belum perhatian terhadap bencana yang akan terjadi	Belum optimalnya kegiatan pelatihan dan sosialisasi bencana

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya

4.1.1 Perumusan Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Adapun tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dicapai yaitu :

Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat

Indikator tujuan:

Indeks penanggulangan bencana

4.1.2 Perumusan Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan secara mudah dan tepat dengan tindakan operasional. Berdasarkan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu:

- Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2. Mewujudkan sinergitas dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana

Dengan indikator sasaran:

- 1. Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2. Penanganan bencana yang terintegrasi

Dalam perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan disusun narasi antara dengan memperhatikan tahapan penjenjangankinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima tahun) seperti yang tersaji pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Tabel Narasi Antara Penjenjangan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan

KegiatanBadan Penanggulangan Bencana Daerah

Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat				
Indikator:				
1. Indeks Penang	gulangan Bencana;			
Mewujudkan Sinergitas dalam Rang	ka Mitigasi dan Penanganan Bencana			
Indi	kator:			
1. Penanganan Bend	ana yang Terintegrasi;			
Pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat	Penanganan pengaduan kedaruratan di Command Center 112			
Indikator:	Indikator:			
Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana;	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit;			
Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat	Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
Indikator:	Indikator:			
1. Jumlah kawasan yang dilakukan penguatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;	1. Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;			
- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;	- Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;			

Indikator: 1. Indeks Penanggulangan Bencana; Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Indikator: 1. Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Indikator: 1. Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan; Melakukan pelayanan Melaksanakan Pemeliharaan Melaksanakan Penyediaan administrasi keuangan dan Pengadaan Sarana Jasa Penunjang Urusan lingkup perangkat daerah **Perkantoran** Lingkup Perangkat Daerah Indikator: Indikator: Indikator: 1. Persentase ketepatan 1. Persentase peralatan dan 1. Persentase penyediaan waktu pelayanan Gaji dan perlengkapan perkantoran jasa penunjang umum; Tunjangan ASN; dalam kondisi baik; - Sekretariat;

Dari hasil pentahapan kinerja seperti pada tabel 4.1. tersebut kemudian disusun perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan nomenklatur yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 seperti yang tersaji pada tabel 4.2

Tabel 4.2.

Tabel Penjenjangan Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan KegiatanBadan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan PD	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat
	Indikator:
	1. Indeks Penanggulangan Bencana;
Sasaran PD	Mewujudkan Sinergitas dalam Rangka Mitigasi dan Penanganan Bencana
	Indikator:
	Penanganan Bencana yang Terintegrasi;
Program PD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	Indikator:
	 Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit;
	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana;

Kegiatan PD	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
	Indikator:	Indikator:	
	Jumlah kawasan yang dilakukan penguatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;	
Penanggung	- Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;		
Jawab	- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;		

Tujuan PD	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat Indikator: 1. Indeks Penanggulangan Bencana;			
Sasaran PD	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat			
	Indikator: 1. Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah;			
Program PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator: 1. Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan;			
Kegiatan PD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator:	Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator:	
	1. Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN;	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik;	Persentase penyediaan jasa penunjang umum;	
Penanggung Jawab		- Sekretariat;		

Untuk lebih jelasnya perumusan tujuan, sasaran, dan Indikatorsasaran dapat dilihat dalam Tabel 4.3 (T-C.25)

Tabel 4.3 (T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Indeks Penanggulangan Bencana	0,792	0,828	0,864	0,899	0,935
1.1	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75,50	77,00	79,00	81,00	83,00
1.2	Mewujudkan Sinergitas dalam Rangka Mitigasi dan Penanganan Bencana	Penanganan Bencana yang Terintegrasi	0.64	0.71	0.78	0.85	0.92

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dan juga pada tahap ini menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan seperti dalam menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis kemudian Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan jangka menengah Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

Tabel 5.1 Kertas Kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan

Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Masyarakat	Belum	Terciptanya	Pendekatan	Penguatan
belum	optimalnya	ketentraman dan	simultan antara	hubungan dan
terkonsentrasi	fungsi Kelurahan	ketertiban	programatik	kerjasama dengan
pada peningkatan	Tangguh	masyarakat	pemerintahan	masyarakat
Kelurahan	Bencana		kota dengan	
Tangguh			penguatan	
Bencana karena			partisipasi	
adanya aktivitas			masyarakat	
lain			secara mandiri	
Keterbatasan	Belum	Meningkatnya	Peningkatan	Penguatan sistem
akses jaringan	optimalnya	kualitas mitigasi	sumberdaya dan	identifikasi
Call Center 112	layanan respon	dan penanganan	jangkauan	bencana berbasis
	cepat darurat	bencana berbasis	penanggulangan	spasial untuk
	bencana	masyarakat	bencana berbasis	mengembangkan
			spasial	mitigasi yang tepat
, ,	layanan respon cepat darurat	dan penanganan bencana berbasis	jangkauan penanggulangan bencana berbasis	identifikasi bencana berbas spasial untuk mengembangka

Berikut tabel T-C.26 tentang tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya :

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan

MISI 4 : Memantapkan Transformasi Birokrasi Yang Bersih, Dinamis Dan Tangkas Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

MISI 5 : Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan Sosial dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kulaitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana	Penerapan teknologi informasi yang adaptif dan responsif
	Mewujudkan Sinergitas dalam rangka Mitigasi dan Penanganan Bencana	Peningkatan sumber daya dan jangkauan penanggulangan bencana berbasis spasial	Penguatan sistem identifikasi bencana berbasis spasial untuk mengembangkan mitigasi yang tepat

Dalam penyusunan arah kebijakan Renstra PD dan pentahapan pelaksanaannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyeleraskan denganarah kebijakan RPJMD seperti tersaji pada tabel 5.3.

Tabel 5.3 Linieritas Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra PD

No	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Renstra PD	Time H		ah Kebijak ait Renstr	an RPJM a PD	D yang
	RPJM D		2022	2023	2024	2025	2026
(2) (1)	Mewujudkan Keharmonisan Sosial, Keamanan dan Ketentraman	Penguatan hubungan dan kerjasama dengan masyarak at	V	V	V	V	V
1.	Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat	Penguatan sistem identifikasi bencana berbasis spasial untuk mengembangkan mitigasi yang tepat	V	V	V	V	V

Dalam mengidentifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait untuk menjawab atau mengimplementasikan Janji Politis Kepala Daerah sebagaimana **Tabel 5.4** bertujuan untuk memastikan janji politis tersebut bisa terealisasi.

Tabel 5.4
Liniearitas Arah Program Politis Terhadap Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Politis	Program Nomenklatur	Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja
Peningkatan kualitas layanan pusat komando 112 respon cepat masalah rakyat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan kualitas layanan		Delevenen	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
pusat komando 112 respon cepat masalah rakyat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Politis	Program Nomenklatur	Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja
Peningkatan keamanan kota dengan instrumen	Program Penanggulangan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
teknologi informasi	Bencana	terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan kota Surabaya pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusunlah perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, yang menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan. Pedoman tersebut adalah indikator-indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja dari program dan kegiatan, dilengkapi pendanaan indikatif yang dibutuhkan untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pada penentuan target indikator kinerja program dan kegiatan memperhatikan trend capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Penentuan target yang ditetapkan mempertimbangkan identifikasi faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.

Penentuan peningkatan target kinerja ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor internal yaitu kekuatan dan faktor eksternal yaitu peluang yang dimiliki dalam memacu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan faktor internal yaitu kelemahan dan faktor eksternal yaitu ancaman dipertimbangkan dalam rasionalisasi target capaian.

Pendanaan indikatif ditentukan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan terutama yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan Kota Surabaya.

Berikut tabel T-C.27 tentang rencana program, kegiatan dan pendanaan :

Tabel 6.1 (T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,	Dat a Cap aian Tah						a Program o	ı						PD Penang	Lo ka
Jasaran		Sub Kegiatan	Kegiatan,	un	2	022	20)23	2	024	2	025	20)26	Kondi	isi Akhir	gung Jawab	si
			Sub Kegiatan	Aw al	Target	Rp												
Meningkatn ya kualitas mitigasi dan penangana n bencana berbasis masyarakat			Indeks Penanggu langan Bencana	0,73 2	0,792	Rp 56.2 41.208.5 49	0,828	Rp 59.8 82.103. 255	0,864	Rp 61.22 5.498.04 4	0,899	Rp 63.9 94.925.0 35	0,935	Rp 64.5 45.592. 943	0,935	Rp 64.5 45.592.9 43	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	
Meningk atkan Akuntabi litas Penyele nggaraa n Pemerint ahan Daerah pada Badan Penangg ulangan Bencana dan Perlindu ngan Masyara kat			Nilai SAKIP Badan Penanggu langan Bencana Daerah	75,5 0	75,50	Rp 13.9 22.691.5 95	77,00	Rp 14.6 41.326. 903	79,00	Rp 14.99 5.126.98 1	81,00	Rp 15.3 75.057.3 89	83,00	Rp 15.8 65.209. 574	83,00	Rp 15.8 65.209.5 74	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	

Tujuan /	., .		Program,	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Dat a Cap aian				Tarç	get Kinerj	a Program o	dan Keran	gka Pendar	naan				PD Penang	Lo
Sasaran	Kode		Kegiatan, ub Kegiatan	Program, Kegiatan,	Tah un	2	022	20)23	2	024	2	025	20	26	Kondi	si Akhir	gung Jawab	ka si
				Sub Kegiatan	Aw al	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	1.05.01	PE UF PE AN KA	ROGRAM ENUNJANG RUSAN EMERINTAH N DAERAH ABUPATEN/ DTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekreta riatan	92.1 8%	93%	Rp 13.9 22.691.5 95	93%	Rp 14.6 41.326. 903	94%	Rp 14.99 5.126.98 1	94%	Rp 15.3 75.057.3 89	95%	Rp 15.8 65.209. 574	95%	Rp 15.8 65.209.5 74	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	
	1.05.01 .2.02		Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persentas e ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100%	Rp 11.1 16.007.6 73	100%	Rp 11.3 93.907. 865	100%	Rp 11.67 8.755.56 1	100%	Rp 11.9 70.724.4 50	100%	Rp 12.2 69.992. 562	100%	Rp 12.2 69.992.5 62	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	
	1.05.01 .2.02.0 1		Penyedi aan Gaji dan Tunjang an ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Ora ng/b ulan	Orang/ bulan	Rp 11.1 16.007.6 73	25 Orang/ bulan	Rp 11.3 93.907. 865	25 Orang/ bulan	Rp 11.67 8.755.56 1	25 Orang/ bulan	Rp 11.9 70.724.4 50	25 Orang/ bulan	Rp 12.2 69.992. 562	25 Orang/ bulan	Rp 12.2 69.992.5 62	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	
	1.05.01 .2.06		Administra si Umum Perangkat Daerah	Persentas e peralatan dan perlengka pan perkantor an dalam kondisi baik	100	100%	Rp 1.68 2.553.13 2	100%	Rp 1.56 8.213.7 59	100%	Rp 1.607 .630.956	100%	Rp 1.55 8.555.91 5	100%	Rp 1.65 9.697.0 50	100%	Rp 1.65 9.697.05 0	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	

Tui	uan /		Program,	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Dat a Cap aian				Tarç	get Kinerj	a Program o	dan Keran	gka Pendar	naan				PD Penang	Lo
Sas	saran	Kode	Kegiatan, ıb Kegiatan	Program, Kegiatan,	Tah un	2	022	20)23	2	024	2	025	20	26	Kondi	isi Akhir	gung Jawab	ka si
				Sub Kegiatan	Aw al	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawas	
		1.05.01 .2.06.0 2	Penyedi aan Peralat an dan Perleng kapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	17 Pak et	Paket	Rp 1.68 2.553.13 2	17 Paket	Rp 1.56 8.213.7 59	17 Paket	Rp 1.607 .630.956	17 Paket	Rp 1.55 8.555.91 5	17 Paket	Rp 1.65 9.697.0 50	17 Paket	Rp 1.65 9.697.05 0	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	
		1.05.01 .2.08	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentas e penyediaa n jasa penunjang umum	100 %	100%	Rp 1.12 4.130.79 0	100%	Rp 1.67 9.205.2 79	100%	Rp 1.708 .740.464	100%	Rp 1.84 5.777.02 4	100%	Rp 1.93 5.519.9 62	100%	Rp 1.93 5.519.96 2	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	
		1.05.01 .2.08.0 4	Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12 Lap oran	Lapora n	Rp 1.12 4.130.79 0	12 Lapora n	Rp 1.67 9.205.2 79	12 Lapor an	Rp 1.708 .740.464	12 Lapora n	Rp 1.84 5.777.02 4	12 Lapora n	Rp 1.93 5.519.9 62	12 Lapora n	Rp 1.93 5.519.96 2	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program, Kegiatan,	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,	Dat a Cap aian Tah		000				a Program o				•			PD Penang gung	Lo ka
Gasaran		Sub Kegiatan	Kegiatan,	un	2	022	20)23	2	024	2	025	20)26	Kona	isi Akhir	Jawab	si
			Sub Kegiatan	Aw al	Target	Rp												
Mewujud kan Sinergita s dalam Rangka Mitigasi dan Penanga nan Bencana			Penangan an Bencana yang Terintegra si	0.57	0.64	Rp 42.3 18.516.9 54	0.71	Rp 45.2 40.776. 352	0.78	Rp 46.23 0.371.06 3	0.85	Rp 48.6 19.867.6 46	0.92	Rp 48.6 80.383. 369	0.92	Rp 48.6 80.383.3 69	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	
	1.05.03	PROGRAM PENANGGUL ANGAN BENCANA	Persentas e pengadua n kedarurat an yang direspon < 7 menit	100 %	100%	Rp 42.3 18.516.9 54	100%	Rp 45.2 40.776. 352	100%	Rp 46.23 0.371.06 3	100%	Rp 48.6 19.867.6 46	100%	Rp 48.6 80.383. 369	100%	Rp 48.6 80.383.3 69	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	
			Persentas e Peningkat an Kapasitas Masyarak at dalam Upaya Mitigasi Bencana	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	

Tujuan /	Wa da		ogram,	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Dat a Cap aian				Tarç	get Kinerj	a Program o	lan Keran	gka Pendar	naan				PD Penang	Lo
Sasaran	Kode		giatan, Kegiatan	Program, Kegiatan,	Tah un	2	022	20)23	2	024	20	025	20	26	Kond	isi Akhir	gung Jawab	ka si
				Sub Kegiatan	Aw al	Target	Rp												
	1.05.03 .2.02	Pe n c Ke aa ter	elayanan encegaha dan esiapsiag in rhadap encana	Jumlah pelaksana an kegiatan dalam Pelayanan Pencegah an dan Kesiapsia gaan terhadap Bencana	42 Kegi atan	31 Kegiat an	Rp 17.4 28.905.3 29	42 Kegiata n	Rp 18.3 45.740. 230	42 Kegiat an	Rp 18.61 0.191.99 9	42 Kegiat an	Rp 19.4 50.790.8 56	42 Kegiata n	Rp 20.3 20.537. 831	42 Kegiat an	Rp 20.3 20.537.8 31	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	
	1.05.03 .2.02.0 2		Pelatiha n Penceg ahan dan Mitigasi Bencan a Kabupa ten/Kot a	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegah an dan Mitigasi Bencana	1.65 0 Ora ng	Orang	Rp 1.17 0.586.99 3	1.650 Orang	Rp 2.72 6.467.8 95	1.650 Orang	Rp 3.009 .980.171	1.650 Orang	Rp 3.16 0.230.45 2	1.650 Orang	Rp 3.31 8.289.3 51	1.650 Orang	Rp 3.31 8.289.35 1	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	

Tujuan /			rogram,	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Dat a Cap aian				Tarç	get Kinerj	a Program o	dan Keran	gka Pendar	naan				PD Penang	Lo
Sasaran	Kode	Sub	egiatan, Kegiatan	Program, Kegiatan,	Tah un	2	022	20)23	2	024	2	025	20)26	Kond	si Akhir	gung Jawab	ka si
				Sub Kegiatan	Aw al	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	vawas	
	1.05.03 .2.02.0 6		Pengua tan Kapasit as Kawasa n untuk Penceg ahan dan Kesiaps iagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatk an Kapasitas nya dalam Pencegah an dan Kesiapsia gaan Bencana	0 Kaw asa n	Kawas an	Rp 16.0 68.919.5 73	30 Kawas an	Rp 15.4 13.146. 476	31 Kawas an	Rp 15.21 8.266.03 2	31 Kawas an	Rp 16.0 73.017.6 83	31 Kawas an	Rp 16.6 69.689. 472	31 Kawas an	Rp 16.6 69.689.4 72	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	
	1.05.03 .2.02.0 4		Penyedi aan Peralat an Perlindu ngan dan Kesiaps iagaan terhada p Bencan a	Jumlah Peralatan Penyelam atan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 Unit	Unit	Rp 189. 398.763	5 Unit	Rp 206. 125.859	5 Unit	Rp 381.9 45.796	5 Unit	Rp 217. 542.721	5 Unit	Rp 332. 559.008	5 Unit	Rp 332. 559.008	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	

Tujuan /	Kada		Program,	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Dat a Cap aian				Tarç	get Kinerj	a Program o	dan Keran	gka Pendar	naan				PD Penang	Lo
Sasaran	Kode	Sı	Kegiatan, ub Kegiatan	Program, Kegiatan,	Tah un	2	022	20)23	2	024	2	025	20)26	Kond	isi Akhir	gung Jawab	ka si
				Sub Kegiatan	Aw al	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	oawab	
	1.05.03 .2.03		Pelayanan Penyelama tan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelam atan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jeni s	1200 Jenis	Rp 24.8 89.611.6 25	10 Jenis	Rp 26.8 95.036. 122	10 Jenis	Rp 27.62 0.179.06 4	10 Jenis	Rp 29.1 69.076.7 90	10 Jenis	Rp 28.3 59.845. 538	10 Jenis	Rp 28.3 59.845.5 38	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	
	1.05.03 .2.03.0 4		Penyedi aan Logistik Penyela matan dan Evakua si Korban Bencan a Kabupa ten/Kot a	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat kan Distribusi Logistik Penyelam atan dan Evakuasi Korban Bencana	467 Ora ng	Orang	Rp 2.06 5.014.68 6	467 Orang	Rp 2.11 3.967.4 56	467 Orang	Rp 2.164 .103.224	467 Orang	Rp 2.21 5.531.12 2	467 Orang	Rp 2.26 8.308.3 70	467 Orang	Rp 2.26 8.308.37 0	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	

Tujuan / Sasaran	Kode	Keg	gram, giatan, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,	Dat a Cap aian Tah	2	022	20	Tar <u>(</u>		a Program o	T	gka Pendar 025	Г	26	Kond	isi Akhir	PD Penang gung	Lo ka si
				Kegiatan, Sub Kegiatan	un Aw al	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Jawab	
	1.05.03 .2.03.0 3		Pencari an, Pertolo ngan dan Evakua si Korban Bencan a Kabupa ten/Kot a	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemuka n, Ditolong, dan Dievakuas i Per Jenis Kejadian Bencana	449 7 Ora ng	Orang	Rp 22.8 24.596.9 39	4497 Orang	Rp 24.7 81.068. 666	4497 Orang	Rp 25.45 6.075.84 0	4497 Orang	Rp 26.9 53.545.6 68	4497 Orang	Rp 26.0 91.537. 168	4497 Orang	Rp 26.0 91.537.1 68	Badan Penang gulanga n Bencan a Daerah	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya yaitu menyelenggarakan kewenangan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana dan tugas lain diberikan oleh Walikota Surabaya, unsur-unsur bidang diantaranya Bidang Pencegahan dan dan Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi Kesiapsiagaan dan Rekonstruksi. Masing-masing bidang mencerminkan dan berkontribusi pada misi kota yaitu Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien untuk ditetapkan sebagai tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya yaitu Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat.

Pada tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya dengan Indikator Indeks Penanggulangan Bencana ditetapkan indikator sasaran OPD.

Indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya mengacu pada indikator tujuan dan sasaran pembangunan tersebut dengan maksud untuk memastikan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya dapat mendukung pencapaian visi melalui misi pembangunan kota.

Sasaran yang ditetapkan untuk mendukung tercapainya tujuan ini ada 2 (dua) yaitu :

 Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana, sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target untuk tahun 2022- 2026 berturut-turut adalah 75.50, 77.00, 79.00, 81.00, 83.00. 2. Mewujudkan Sinergitas dalam rangka Mitigasi dan Penanganan Bencana, sasaran ini diukur dengan indikator Penanganan Bencana yang Terintegrasi dengan target untuk tahun 2022- 2026 berturut-turut adalah 0.64, 0.71, 0.78, 0.85, 0.92.

Berikut Tabel T-C 28 indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan kota Surabaya :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi
			2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
1	Tujuan							
	Indeks Penanggulangan Bencana	0,732	0,792	0,828	0,864	0,899	0,935	0,935
2	Sasaran							
	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75,50	75,50	77,00	79,00	81,00	83,00	83,00
3	Sasaran							
	Penanganan Bencana yang Terintegrasi	0.57	0.64	0.71	0.78	0.85	0.92	0.92

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dengan

memandang situasi dan kondisi di lapangan saat ini, serta memperhatikan

masukan dari hasil rumusan RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026, juga

didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin serta insidentil.

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Surabaya merupakan manifestasi dari segenap aparaturnya

dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021, tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mendukung Visi Kota

Surabaya yaitu "GOTONG ROYONG MENUJU SURABAYA KOTA DUNIA

YANG MAJU, HUMANIS DAN BERKELANJUTAN".

Surabaya, 10 Mei 2022

PIt. KEPALA BADAN

Drs. Ridwan Mubarun, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 197205081993011002